

FLAMMA

Edisi 33, Januari - Maret 2010



Mehuntaskan

TARGET LAMA

**Sengkarut
Penanggulangan
Kemiskinan**



FLAMMA EDISI 33

JANUARI - MARET 2010

daftar isi

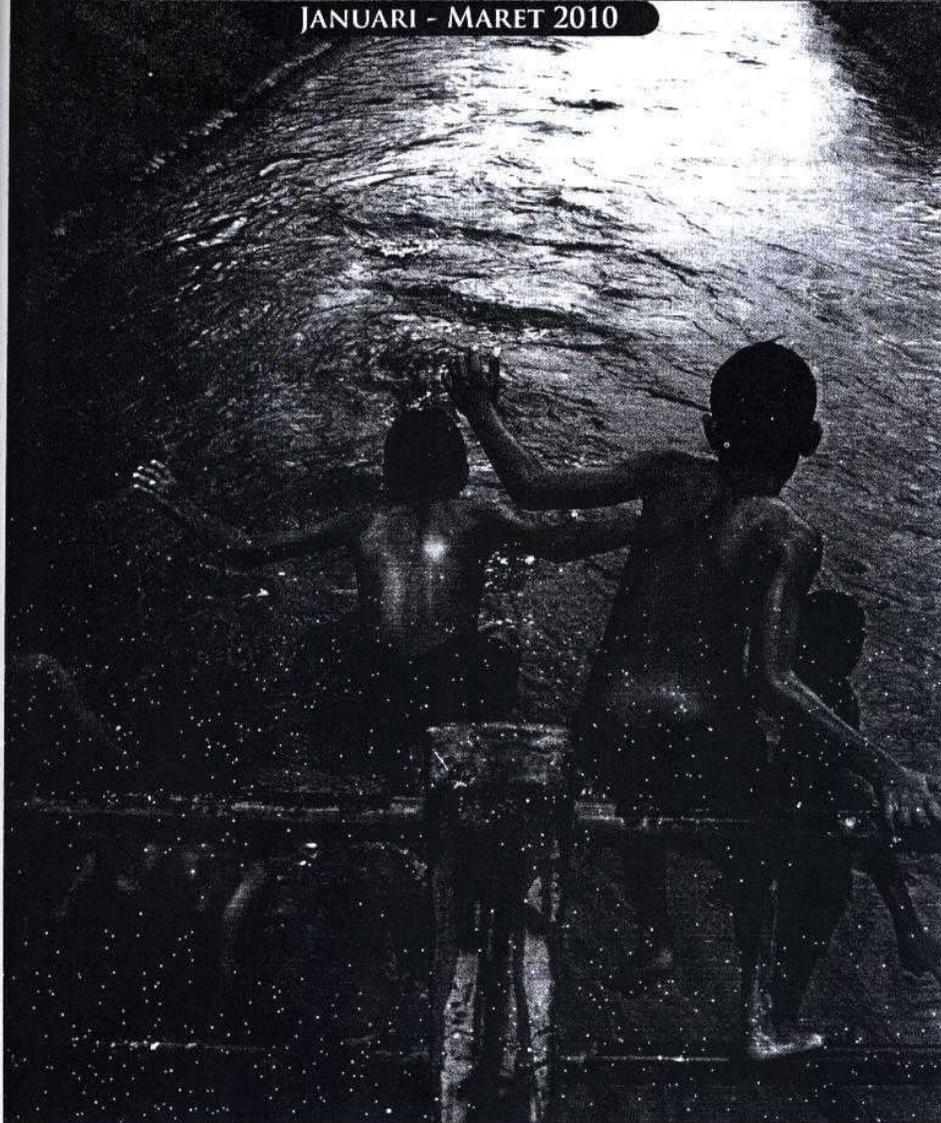


Foto: Adrozen Ahmad

6 SOROT

SOROT edisi ini mengupas sengkarut penanggulangan kemiskinan yang ditandai *fragmented program* dan anggaran, lemahnya koordinasi antar pihak dan sinkronisasi aneka program, hingga keluhan daerah terhadap desain program pusat yang masih bernuansa sentralistis dan seragam. Adakah gagasan untuk keluar dari sengkarut ini?

4 GAGAS

Sulit dipungkiri, feminisasi kemiskinan adalah sebuah realitas. Kaum perempuan menjadi kelompok termiskin dari yang paling miskin (*the poorest of the poor*). Perempuan terpojok oleh konstruksi sosial, budaya, agama, serta ideologi negara sehingga selalu menjadi pihak yang kalah. Tulisan di rubrik GAGAS mengelaborasi strategi program guna memerangi kemiskinan yang berbasis gender.

KUPAS

Tradisi memberikan sumbangan dan hadiah pada perayaan pernikahan, misalnya, adalah sesuatu yang wajar baik di Italia maupun Indonesia. Tapi, ketika orang merasa gengsi menyumbang atau memberi hadiah sepantasnya, bukankah tradisi ini telah berubah dari modal sosial menjadi beban sosial? Bagaimana caranya agar tradisi sosial ini bisa memberi manfaat?

SELEPAS

HUJAN, anak-anak sekitar aliran Selokan Mataram biasa bermain air, mandi atau berenang seusai pulang sekolah.

Perspektif	5
Gagas	14
Manifesto	16
Potensi	26
Kupas	28
Sosok	40
Refleksi	42



RANCANG DAN FOTO SAMPLU: ADROZEN AHMAD



Penanggungjawab Arie Sujito Pemimpin Umum Krisdyatmiko Pemimpin Redaksi Ashari Cahyo Edi Redaktur Senior Sutoro Eko, Bambang Hidayana Redaktur Pelaksana Ahmad Subhan, Sugeng Yulianto Sidang Redaksi Abdur Rozaki, Ahmad Subhan, Arie Sujito, Ashari Cahyo Edi, Dina Mariana, Bambang Hidayana, Krisdyatmiko, Machmud NA, Sugeng Yulianto, Sunaji Zamroni, Titok Hariyanto Reporter Ardin, Nurhikmah, Sugianto Kontributor Sigit Giri Wibowo (Tangerang), M. Zaenal Anwar (Adelaide-Australia), Novia Cici Anggraeni (Florenze-Italia), Afra (Yogyakarta) Artistik & Fotografi Adrozen Ahmad Pemimpin Perusahaan Meilda Wiguna Sirkulasi, Iklan, & Pemasaran Machmud NA Alamat Redaksi Jalan Palagan Tentara Pelajar Km 9,5 Dusun Tegalrejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Telp/Faks +62 274 867-686 atau 748-2091 Email flamma@ireyogya.org Website www.ireyogya.org.

Redaksi menerima sumbangan tulisan (opini atau tulisan reportase), fotografi, ilustrasi yang selaras dengan visi dan misi pemberdayaan IRE.

Feminisasi Kemiskinan: Potret Kemiskinan Berwajah Perempuan

SEORANG PEREMPUAN duduk termenung di depan pintu, di sebuah rumah berlantai tanah, di antara dinding kayu yang mulai lapuk di makan usia, lengkap dengan pakaian lusuh, dan tanpa alas kaki. Jari-jemari keriputnya terlihat jelas. Ini adalah foto sebuah sampul Majalah *Time*, salah satu majalah bereputasi internasional. Foto ini secara sempurna berhasil menyuguhkan potret perempuan yang tengah berada dalam balutan kemiskinan.

Tentu saja ini bukanlah rekayasa media yang menempatkan perempuan sebagai sosok yang punya nilai jual lebih tinggi di pasaran ketimbang laki-laki. Namun sesungguhnya ini adalah cermin betapa kemiskinan sangat dekat dengan perempuan. Bahkan, saking begitu lekatnya kemiskinan dengan kehidupan perempuan, keduanya seolah berada dalam satu tarikan nafas.

Sulit dipungkiri, feminisasi kemiskinan adalah sebuah realitas. Tengok saja data Persatuan Bangsa-Bangsa. Menurut PBB, dari 1,3 miliar warga dunia yang masuk dalam kategori miskin, 70 persen diantaranya adalah kaum perempuan. Sementara di Indonesia, merujuk data hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (Amrudin & Purnama, 2005), Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia periode 1998-2003 amat tinggi yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup. Masih kasus Indonesia, *Human Development Report* tahun 2006 menunjukkan, partisipasi murid perempuan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perempuan yang masuk SD hanya sebesar 49 persen dibanding laki-laki, 46 persen (SMP), 41 persen (SMA), dan 33 persen (perguruan tinggi).

Secara umum, indeks pembangunan gender di Indonesia teramat rendah. Dari 177 negara yang di survey, Indonesia berada di peringkat 108, dan menempati posisi paling buncit di level ASEAN. Penetapan indeks pembangunan gender ini mengacu antara lain dari angka harapan hidup, angka melek huruf, partisipasi murid sekolah dan GDP riil perkapita. Rendahnya angka indeks tersebut dengan mudah menjelaskan tingginya angka kemiskinan di kalangan perempuan. Angka-angka tersebut juga menegaskan sekali lagi bahwa kemiskinan di Indonesia berdimensi gender.

Faktor Kultural dan Struktural

Perempuan Indonesia adalah perempuan dengan penjelasan non-monolitik, yang hidup dalam kompleksitas dan ke-

majemukan. Faktor nilai-nilai budaya dan agama yang begitu dominan menerangkan secara tersendiri konteks kehidupan perempuan di Indonesia. Dalam konteks budaya, misalnya, perempuan terstigma sebagai *the second class* (warga kelas dua). Kuatnya ideologi gender yang memilah perempuan dan laki-laki tidak hanya berdasar jenis kelamin, namun juga peran dari masing-masing jenis kelamin, telah memarjinalkan posisi perempuan. Terdapat dikotomi peran gender yang tajam di masyarakat. Peran jender perempuan adalah di ranah domestik dan peran jender laki-laki adalah di ranah publik. Aktivitas publik selalu dikaitkan dengan laki-laki dan pekerjaan domestik yang bersifat non-produktif selalu di identikan dengan perempuan. Implikasinya, ketika perempuan terjun ke sektor publik (dunia kerja), eksistensinya kurang diperhitungkan.

Interpretasi Undang-Undang Perkawinan yang cenderung bias, misalnya, menyisakan persoalan tersendiri bagi perempuan. UU perkawinan di Indonesia secara eksplisit menyebutkan bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga dan bukan pencari nafkah utama. Ketentuan ini kemudian berimbas pada aturan ketengakerjaan di mana perempuan mengalami diskriminasi dalam hal pengupahan. Perempuan menerima upah lebih rendah dari laki-laki karena perempuan "hanya" dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Rata-rata upah perempuan hanya 75 persen dari upah pekerja laki-laki meskipun perempuan memiliki rata-rata jam kerja sekitar 30-50 persen lebih panjang untuk pekerjaan dibayar maupun tidak dibayar. Situasi yang tidak kalah memprihatinkan harus dialami oleh perempuan Kepala Keluarga (Radar Jogja, 2008). Kendati bekerja sebagai kepala keluarga, mereka tidak mendapatkan penghasilan yang

lavak. Fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa perempuan menjadi lebih miskin karena berbagai aturan dan tata nilai sosial kurang berpihak pada mereka.

Kemiskinan dan pemiskinan perempuan juga dipengaruhi oleh faktor ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Ketidakadilan terpampang dengan sangat jelas dalam sektor ini. Perempuan yang hidup dalam jeratan kemiskinan kerap kali berhadapan dengan kenyataan betapa sulitnya mendapatkan akses dan kesempatan yang setara terhadap berbagai sumber daya produktif, seperti modal, kredit, tanah, informasi dan pasar.

Gambaran paling mudah adalah persoalan layanan kredit dari lembaga keuangan. Selama ini, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu mata rantai yang hilang

Faktor nilai-nilai budaya dan agama yang begitu dominan menerangkan secara tersendiri konteks kehidupan perempuan di Indonesia



Oleh Ninik Sri Rahayu
Pengajar D-3 Fakultas
Ekonomi & Ketua Bidang
Penelitian Pusat Studi Gender
Universitas Islam Indonesia

perempuan (terutama yang menekuni usaha kecil dan mikro). Aturan dan kebijakan kredit LKM selama ini dibuat dengan kesan netral gender, seolah-olah menganggap bahwa persoalan laki-laki dan perempuan adalah sama. Skema kredit yang menyaratkan pengajuan pembiayaan harus menyertakan agunan sulit di penuhi perempuan. Sebab, dalam masyarakat dengan corak patriakis yang begitu kuat mengakar, hak kepemilikan tanah dan berbagai aset produktif lainnya lebih banyak jatuh ke tangan laki-laki. Akibatnya, sebagai strategi bertahan, perempuan lebih banyak mengandalkan sumber pendanaan dari rentenir dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi, yang pada akhirnya menyeret perempuan dalam perangkap kemiskinan yang berkepanjangan.

Dengan menganalisis dua faktor di atas, dapat dikatakan bahwa perempuan adalah pihak yang paling menderita dalam menanggung beban kemiskinan. Perempuan juga sekaligus menjadi kelompok termiskin dari yang paling miskin (*the poorest of the poor*). Mereka tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin jika ditinjau dari pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti status kesehatan dan pendidikan yang rendah serta minim ketrampilan sehingga secara ekonomis sulit melakukan kegiatan ekonomi produktif. Di pasar tenaga kerja, mereka lebih banyak terkonsentrasi di sektor informal dan marginal sebagai buruh pabrik, buruh cuci, pembantu rumah tangga, pedagang kecil dengan tingkat upah yang rendah dan rentan terhadap eksploitasi.

Dalam himpitan kemiskinan, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling rentan. Dalam banyak kasus, anak perempuan adalah pihak yang pertama kali harus keluar dari jalur pendidikan formal. Anak laki-laki lebih mendapatkan *privilege* untuk menikmati pendidikan lebih tinggi karena anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama untuk keluarga (*breadwinner*). Lebih lanjut, dalam rumah tangga miskin, anak perempuan tidak jarang dipaksa untuk menikah dalam usia dini sebagai pintu keluar untuk mengalihkan beban hidup. Akibat lanjutan yang lebih parah terjadi tatkala perempuan tidak mempunyai pilihan lain selain terjun ke dalam lembah prostitusi dan bahkan perdagangan perempuan (*women trafficking*).

Meretas Strategi

Perempuan menghadapi berbagai persoalan mendasar

akibat gendernya, konstruksi sosial yang melekat pada peran, tanggung jawab, dan perilakunya sebagai perempuan, dan juga karena relasinya yang tidak setara dengan laki-laki sehingga menimbulkan ketidakadilan gender. Hal ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan dan mengakibatkan kemiskinan berbasis gender.

Untuk itu diperlukan strategi pengentasan kemiskinan dengan jalan membuat kebijakan dan program intervensi untuk membantu kaum miskin perempuan. Patut diingat, program-program tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak dasar perempuan. Dalam konteks ini, menarik untuk mencermati gagasan Noerdin (2010) yang mencoba mengidentifikasi tiga langkah dalam upaya memerangi kemiskinan berbasis gender.

Pertama, strategi program peningkatan pendapatan, termasuk di dalamnya adalah perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang non-diskriminatif, pemberdayaan skema kredit usaha mikro dan kecil karena perempuan banyak terlibat di sektor tersebut, penghapusan perbedaan upah laki-laki dan perempuan, dan pemberlakuan standar gaji bagi mereka yang bekerja di sektor informal yang kebanyakan dihuni perempuan.

Kedua, strategi program pengurangan beban/pengeluaran dengan jalan pengendalian dan subsidi harga kebutuhan dasar. Misalnya, pemberian subsidi terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat miskin, seperti minyak tanah, air bersih, listrik, dan beras murah, khususnya bagi perempuan kepala keluarga miskin. *Ketiga*, kebijakan pelayanan sosial

dasar yang terjangkau. Diantaranya adalah pelayanan kesehatan umum, kesehatan reproduksi dan pendidikan yang murah dan bermutu, sehingga terjangkau oleh masyarakat miskin.

Betapun demikian, mendekatkan akses perempuan miskin pada berbagai sumber daya vital barangkali tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan dukungan sosial yang memadai. Nilai-nilai sosial yang memandang perempuan sebagai "orang rumahan", pelaku ekonomi penggiran, dan kelompok lemah perlu ditepikan. Ini penting untuk memastikan perempuan mempunyai ruang gerak yang layak untuk membuat mereka menjadi lebih "berdaya", baik secara ekonomi maupun sosial. Harapannya, ketika perempuan berdaya secara ekonomi dan sosial maka posisi tawar, baik di ruang privat maupun publik akan turut terangkat.

Di pasar tenaga kerja, mereka lebih banyak terkonsentrasi di sektor informal dan marginal..